

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
 Volume 3, Nomor 4, May 2025, P. 384-393
 E-ISSN: 2986-6340
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15687025>

Resistensi Marginal: Perlawanan Masyarakat Desa Sampali Terhadap Ekspansi Citraland Megapolitan

Dimas Kurniawan

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: dimaskurniawan300300@gmail.com

Abstract

This research is entitled "Marginal Resistance: Resistance of the Sampali Village Community to the Citraland Megapolitan Expansion," and aims to examine the forms of resistance carried out by the Sampali Village community against Citraland's megapolitan expansion. Sampali Village, which is located on the outskirts of the city, is facing serious threats to the sustainability of its people's lives due to this large development project. Village residents, the majority of whom work as farmers and laborers, feel the direct impact of land expropriation that threatens their livelihoods and cultural heritage. This research uses qualitative methods with a case study approach to reveal the dynamics of conflict and resistance strategies implemented by local communities. Research findings show that forms of community resistance include protests, filing petitions, and legal efforts to defend land rights. The Sampali Village community showed strong solidarity and courage in facing pressure from developers. In addition, this research highlights the injustices that often arise in the development process where economic interests dominate without considering the welfare of local communities. The case of Sampali Village reflects the importance of inclusiveness and social justice in every development plan to avoid prolonged conflict and wider negative impacts. Thus, this research contributes to the understanding of marginal resistance and provides important insights for more equitable and sustainable development policies.

Keyword: Resistance, Marginal, Expansion, Citraland

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Resistensi Marginal: Perlawanan Masyarakat Desa Sampali Terhadap Ekspansi Citraland Megapolitan," dan bertujuan untuk mengkaji bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sampali terhadap ekspansi megapolitan oleh Citraland. Desa Sampali, yang terletak di kawasan pinggiran kota, menghadapi ancaman serius terhadap keberlanjutan hidup masyarakatnya akibat proyek pembangunan besar tersebut. Penduduk desa, yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan buruh, merasakan dampak langsung dari pengambilalihan lahan yang mengancam mata pencaharian dan warisan budaya mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengungkap dinamika konflik dan strategi perlawanan yang diterapkan oleh masyarakat lokal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlawanan masyarakat mencakup aksi protes, pengajuan petisi, dan upaya hukum untuk mempertahankan hak atas tanah. Masyarakat Desa Sampali menunjukkan solidaritas yang kuat dan keberanian dalam menghadapi tekanan dari pengembang. Selain itu, penelitian ini menyoroti ketidakadilan yang sering muncul dalam proses pembangunan di mana kepentingan ekonomi mendominasi tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat lokal. Kasus Desa Sampali mencerminkan pentingnya inklusivitas dan keadilan sosial dalam setiap rencana pembangunan untuk menghindari konflik berkepanjangan dan dampak negatif yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mengenai resistensi marginal dan memberikan wawasan penting bagi kebijakan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Resistensi, Marginal, Ekspansi, Citraland

Article Info

Received date: 29 May 2025

Revised date: 05 June 2025

Accepted date: 18 June 2025

PENDAHULUAN

Pembangunan perumahan elit Citraland Deli telah menggusur sebagian warga Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sekitar 800 hektar. Penggusuran ini telah menghilangkan sumber penghidupan mayoritas warga desa tersebut. Tembok batas yang dibangun oleh pihak otoritas PT. Ciputra Citraland, telah memisahkan komunitas warga desa secara fisik, yaitu mereka yang tinggal diluar dan didalam perbatasan lahan. Penggusuran lahan bukan hanya sekedar lahan kosong yang dimiliki PTPN, melainkan rumah warga juga ikut tergusur tanpa adanya kesepakatan antara pemilik dan penggusur. Akibat lanjutan dari pembangunan Citraland ini

dapat melemahnya solidaritas warga desa secara keseluruhan dalam menghadapi persoalan sosial dan ekologis terkait perubahan penggunaan lahan, serta ancaman lebih lanjut akibat komersialisasi lahan sekitar (Prasetyo, 2025).

Tulisan ini bermaksud mendiskusikan persoalan-persoalan structural yang dihadapi warga desa Sampali, dalam analisis historis-geografis yang menggunakan perspektif dinamika institusi. Dinamika institusi adalah entitas operasional yang menjembatani hubungan struktur dan agensi (Hodgson, 2004; Jessop, 2001; Mourlaert et al., 2016). Pendekatan ini berguna untuk memahami beragam persoalan structural yang terbentuk dalam jangka panjang dalam hitungan decade bahkan lintas abad dan apa saja institusi-institusi yang mereproduksi persoalan-persoalan structural ini dalam jangka waktu yang lebih pendek. Dalam tulisan ini kami merujuk kepada 'stream of thoughts' yang membahas struktur besar ekonomi-politik tanpa berfokus secara sempit pada determinisme struktur ekonomi, melainkan juga melihat relasinya dengan struktur politik, budaya dan sosial (Healey, 1999; Heijden, 2011; Ostrom, 2005).

Melalui kasus ini, kita melihat struktur besar transformasi agrarian yang melahirkan institusi-institusi structural yang menghalangi perjuangan warga dalam melindungi akses terhadap tempat tinggal dan sumber penghidupan (Windasari et al., 2011). Kasus pembangunan CitraLand dan penggusuran warga mengiringinya tidak dapat disederhanakan hanya sebagai konflik antara PT. Ciputra CitraLand dan komunitas yang tergusur. Untuk memahami kasus ini secara structural, kami mendudukan konflik agrarian ini dalam dua lintasan historis-geografis yang saling terkait. *Pertama*, kasus ini adalah bagian tak terpisahkan dari proses panjang transformasi agraria di Jawa dan Sumatera sejak zaman kolonial. Sistem kontrol kolonial atas tanah dan buruh dalam industri perkebunan berakibat pada proses pemiskinan berkepanjangan masyarakat agraris tradisional melalui disposisi aset bertani di desa asal petani transmigran, proses transmigrasi atau pemindahan orang-orang tak bertanah ini ke area perkebunan, serta informalisasi tenaga kerja industri perkebunan. *Kedua*, konflik ini merupakan bagian dari proses urbanisasi global yang prosesnya mencakup tidak hanya kota-kota berekonomi kuat dan jejaring antara kota-kota besar ini, tetapi juga pedesaan, kota-kota kecil dan area peri-urban yang disertai dengan pembentukan kelas prekariat informal perkotaan (Sholahudin, 2017). Perjuangan warga bersama lembaga pendamping dalam memperjuangkan hak atas tempat tinggal dan sumber penghidupan mengalami banyak keterbatasan, terutama ketika berhadapan dengan institusi-institusi structural akibat pola transformasi agrarian yang telah berlangsung lama. Institusi-institusi structural ini antara lain terkait dengan proses pembangunan yang skala kecil ataupun besar (Marzali, 1997).

Fenomena resistensi marginal kerap kali terlihat pada masyarakat desa yang menghadapi tekanan dari ekspansi korporasi besar. Salah satu contoh nyata adalah perlawanan masyarakat Desa Sampali terhadap ekspansi Citraland Megapolitan. Desa Sampali, yang dulunya merupakan wilayah agraris dengan kehidupan sosial dan budaya yang kuat, kini berada di ambang perubahan drastis akibat rencana pembangunan besar-besaran oleh Citraland Megapolitan. Ekspansi ini tidak hanya mengancam lahan pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian utama, tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sosial budaya masyarakat setempat (Mulyani, 2018). Dalam menghadapi situasi ini, masyarakat Sampali menunjukkan berbagai bentuk perlawanan yang mencerminkan resistensi marginal. Mulai dari protes terbuka, advokasi melalui jalur hukum, hingga strategi non-kooperatif seperti menolak penjualan tanah dan tetap menjalankan aktivitas tradisional di lahan yang diklaim oleh perusahaan. Resistensi ini merupakan cerminan dari keinginan kuat masyarakat untuk mempertahankan identitas dan kemandirian mereka di tengah gempuran modernisasi dan kapitalisasi yang dibawa oleh proyek-proyek besar. Melalui kajian terhadap perlawanan masyarakat Desa Sampali, kita dapat memahami dinamika kompleks antara kekuatan lokal dan kekuatan kapitalis, serta bagaimana resistensi marginal memainkan peran penting dalam mempertahankan keberlanjutan komunitas di tengah arus globalisasi (Astuti, 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, pemimpin lokal, dan warga Desa Sampali yang terkena dampak (Abrizal, 2008). Selain itu, dilakukan juga observasi partisipatif untuk memahami dinamika konflik secara langsung. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan metode penelitian survei. Metode survei dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi yang ada (Moleong, 2017). Metode survei

digunakan untuk menentukan fenomena atau gejala yang informasi tertentu ingin diketahui. Populasi penelitian ini adalah masyarakat sekitar yang tinggal di kawasan sekitar perumahan yang dibangun pengembang. Penelitian ini menggunakan pengambilan sample dengan teknik simple random.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Resistensi Masyarakat Sampali terhadap Pembangunan Citraland

Dalam teori konflik yang dikemukakan Karl Marx (Tualeka, 2017). Karl Marx berpendapat bahwa konflik kelas diambil sebagai titik sentral dari masyarakat. Konflik antara kaum kapitalis dan proletar adalah sentral di masyarakat. Segala macam konflik mengasumsikan bentuk dari peningkatan konsolidasi terhadap kekacauan. Kaum kapitalis telah mengelompokkan populasi pada segelintir orang saja. Kaum borjuis telah menciptakan kekuatas produktif dari semua generasi dalam sejarah sebelumnya. tetapi kelas-kelas itu juga berlawanan antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat menjadi terpecah kedalam dua kelas besar yaitu borjuis dan proletar.

Dasar analisis kalangan marxis adalah konsep kekuatan politik sebagai pembantu terhadap kekuatan kelas dan perjuangan politik sebagai bentuk khusus dari perjuangan kelas. Struktur administratif negara modern adalah sebuah komite yang mengatur urusan sehari-hari kaum borjuis. Sebuah bagian dari produksi umum membuat jalan masa depan bagi konflik-konflik ini. Hal itu memperkirakan bahwa kelas menengah pada akhirnya akan hilang. Pedagang, perajin masuk ke dalam golongan proletar sebab modal kecil tidak dapat bersaing dengan modal besar. Sehingga proletar direkrut dari semua kelas populasi. Perbedaan antara kaum buruh/pekerja kemudian akan terhapus (Tualeka, 2017). Kaum pekerja akan memulai bentuk kombinasi. Konflik akan sering muncul di antara dua kelas ini. Kaum buruh memulainya dengan bentuk perlawanan koalisi borjuis agar upah mereka terjaga. Mereka membentuk perkumpulan yang kuat dan dapat memberikan dukungan kepada mereka ketika perjuangan semakin menguat. Bagian dari proletar dengan unsur-unsur pencerahan dan kemajuan, peningkatan potensial secara revolusioner (Huda et al., 2023).

Dari permasalahan yang dihadapi masyarakat marginal terhadap konflik agraria bahwasannya masyarakat atau warga yang berada di Desa Sampali mereka adalah warga yang terlindas dan termarginalisasi terhadap politik atau kekuasaan. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap kaum berjuis yang mempunyai segalanya. Pemerintahan hanya diam membisu seperti tidak memiliki mulut untuk berbicara dan membela rakyatnya di tindak oleh oknum yang seakan akan memiliki kekuasaan sepenuhnya. Kaum proletar adalah masyarakat yang dipolitisi oleh kekuasaan terhadap penggusuran lahan tersebut (Tualeka, 2017).

Teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf menyatakan bahwa konflik berasal dari perbedaan kekuasaan dan otoritas dalam struktur sosial. Dahrendorf mulai dengan dan sangat dipengaruhi oleh teori fungsionalisme struktural. Ia menyatakan bahwa, menurut fungsionalis, sistem sosial dipersatukan oleh kerja sama sukarela atau oleh konsensus bersama oleh kedua-duanya (Rofiah, 2017). Tetapi, menurut teoritis konflik bahwa masyarakat dipersatukan oleh “ketidakbebasan yang dipaksakan”. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas “selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis” (Nendissa, 2022).

Ralf Dahrendorf kemudian memaparkan tentang kelompok, konflik dan perubahan. Dahrendorf membedakan tiga tipe utama kelompok. Pertama adalah kelompok semu (quasi group) atau sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama. Kedua adalah kelompok kepentingan. Ketiga adalah kelompok konflik yang muncul dari berbagai kelompok kepentingan. Singkatnya Dahrendorf menyatakan bahwa segera setelah kelompok konflik muncul, kelompok itu melakukan tindakan yang melakukan perubahan dalam struktur sosial. Bila konflik itu hebat, perubahan yang terjadi adalah radikal. Bila konflik disertai dengan tindakan kekerasan maka akan terjadi perubahan struktur secara tiba-tiba (Ridwantono, 2014).

Konflik masyarakat Sampali terhadap pembangunan Citraland dipandang sebagai manifestasi ketidakadilan struktural yang dihasilkan oleh dinamika kapitalisme. Perspektif ini menyoroti bagaimana kepentingan ekonomi dan politik elite sering kali mengorbankan masyarakat kecil. Pembangunan Citraland dilihat sebagai upaya akumulasi kapital oleh pengembang besar yang didukung oleh kekuatan negara. Masyarakat Sampali, sebagai kelompok yang termarginalkan, dipaksa untuk menanggung

beban sosial dan lingkungan demi keuntungan segelintir elite (Saputro, 2019). Penolakan dan perlawanan mereka merupakan bentuk protes terhadap ketidakadilan ini. Konflik ini merupakan hasil dari struktur sosial dan ekonomi yang ada. Struktur masyarakat yang terbagi atas kelas-kelas sosial membuat kepentingan kelompok pengembang bertentangan dengan kepentingan masyarakat lokal. Struktur kekuasaan dan kepemilikan tanah yang tidak adil menyebabkan masyarakat Sampali berada dalam posisi yang lemah, sehingga mereka terpaksa menerima dampak negatif dari pembangunan ini. Strukturalisme melihat bahwa solusi dari konflik ini harus melibatkan perubahan mendasar dalam struktur sosial dan ekonomi, seperti reformasi agraria dan redistribusi kekayaan (Aminah, 2016).

Melihat dari masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait dan bekerja bersama untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan. Konflik masyarakat Sampali terhadap pembangunan Citraland dianggap sebagai disfungsi dalam sistem sosial. Menurut perspektif ini, konflik ini muncul karena ketidakcocokan antara kepentingan pengembang dan masyarakat lokal. Fungsionalisme akan menganalisis bagaimana setiap bagian dari masyarakat dapat disesuaikan untuk mencapai harmoni dan keseimbangan, misalnya melalui negosiasi dan kompensasi yang adil bagi masyarakat terdampak, serta upaya untuk mengintegrasikan mereka ke dalam keuntungan ekonomi dari pembangunan (Maiwan, 2015).

Konflik ini dapat dipahami sebagai hasil dari interpretasi yang berbeda terhadap makna pembangunan. Bagi pengembang, Citraland mungkin dilihat sebagai simbol kemajuan dan modernitas, sedangkan bagi masyarakat Sampali, pembangunan tersebut mungkin dilihat sebagai ancaman terhadap identitas dan cara hidup mereka. Perspektif ini menekankan pentingnya dialog dan komunikasi untuk memahami perspektif masing-masing pihak dan menemukan cara-cara untuk mencapai pemahaman dan kesepakatan bersama. konflik ini dapat dianalisis dengan melihat bagaimana pembangunan Citraland mempengaruhi perempuan di masyarakat Sampali. Pembangunan sering kali membawa perubahan yang berdampak besar pada perempuan, baik dalam hal akses terhadap sumber daya, kesempatan ekonomi, maupun peran sosial mereka (Ridha, 2014). Perempuan sering kali menjadi kelompok yang paling rentan dalam proses pembangunan karena mereka mungkin memiliki akses yang lebih terbatas terhadap kompensasi dan dukungan. Perspektif feminisme akan menyoroti pentingnya memperhatikan dan mengutamakan kebutuhan serta hak-hak perempuan dalam setiap tahap pembangunan, termasuk dalam proses konsultasi, kompensasi, dan pelibatan mereka dalam pengambilan keputusan. Dengan memahami konflik ini dari berbagai perspektif, kita dapat melihat bahwa penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang holistik, inklusif, dan adil yang mempertimbangkan semua dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan (Natsir & Ridha, 2018).

Indikator Konflik yang Mempengaruhi Masyarakat Sampali Tertindas

Ada beberapa indikator yang terjadi dalam permasalahan penggusuran atau konflik agraria di Desa Sampali terhadap pembangunan Citraland (Sumartono, 2019).

a. Distribusi kekuasaan yang tidak merata

Ketika kekuasaan politik Ketika kekuasaan politik dan ekonomi terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara kelompok lain merasa terpinggirkan, ini dapat menjadi sumber utama konflik. Ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan dapat menciptakan ketegangan dan resistensi dari kelompok yang dirugikan. Dapat disimpulkan bahwasannya peran pemerintah desa dalam memberi kekuasaan sangat tidak adil terhadap masyarakat atau warga sekitar, dikarenakan pemerintah desa hanya memberi kekuasaan kepada kaum-kaum penguasa seperti PT. Ciputra yang ingin membangun perumahan elit seandainya tanpa memikirkan nasib masyarakat lokal. Seharusnya pihak penguasa memberikan solusi kepada warga setelah hak mereka diambil dan pemerintah tidak sedikitpun melirik masyarakat yang sedang dalam konflik permasalahan lahan (Dahlan, 2020).

b. Akses terhadap sumber daya

Persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, seperti tanah, air, pekerjaan, atau pendidikan, sering kali menjadi pemicu konflik. Ketika satu kelompok merasa dirampas haknya atas sumber daya ini, konflik bisa terjadi. Masyarakat merasa termarginalisasikan terhadap hak milik mereka, merasa dirampas hak mereka terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka memiliki hak milik tanah untuk tinggal diatas lahan itu atas dasar kesepakatan pemerintah desa. Tapi setelah warga merasa dirugikan disitu tidak ada kepedulian terhadap warga sekitar.

c. Mobilisasi dan kepemimpinan

Adanya pemimpin atau kelompok yang mampu memobilisasi orang untuk bertindak terhadap ketidakadilan yang dirasakan bisa memperkuat dan memperpanjang konflik. Kepemimpinan yang kuat sering kali memainkan peran penting dalam mengorganisir perlawanan dan protes. Indikator ini berpengaruh bahwasannya kekuasaan bisa dibeli dengan uang, karena kepemimpinan yang adil dulunya sekarang berubah menjadi tidak adil karena sebuah kekuasaan yang hakiki.

d. Hukum dan kebijakan yang diskriminatif

Kebijakan pemerintah yang diskriminatif atau tidak adil terhadap kelompok tertentu dapat menjadi pemicu konflik. Ketidakadilan struktural yang dilegitimasi oleh hukum sering kali menjadi sumber utama ketegangan. Di Indonesia sekarang hukum tumpul terhadap masyarakat pinggiran, seakan-akan hukum hanya milik orang yang berkuasa. Masyarakat tertindas, pemerintahan senang karena kekuasaan mereka sudah dibeli dan seandainya mendiskriminatif masyarakat marginal.

Salah satu indikator utama konflik yang mempengaruhi masyarakat Desa Sampali terhadap pembangunan Citraland Megapolitan adalah pengambilalihan lahan dan pemukiman. Proses ini sering kali berlangsung tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat setempat, dan dalam banyak kasus, mereka dipaksa melepaskan tanah yang telah mereka huni dan garap selama bertahun-tahun. Pengambilalihan ini menimbulkan ketidakpastian dan kehilangan mata pencaharian bagi banyak keluarga yang bergantung pada pertanian dan aktivitas ekonomi lokal. Selain itu, minimnya kompensasi yang adil dan transparan memperburuk situasi, menyebabkan rasa ketidakadilan yang mendalam di kalangan warga. Konflik juga diperparah oleh kerusakan lingkungan akibat pembangunan, seperti polusi dan perubahan lanskap yang mengganggu ekosistem lokal dan aktivitas agrikultur (Astarika, 2016). Ketidakmampuan pemerintah atau pihak pengembang untuk memberikan solusi yang memadai memperkuat perasaan terpinggirkan dan ditindas. Selain itu, aspek sosial budaya juga menjadi indikator penting, di mana pembangunan yang agresif mengancam kearifan lokal dan nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Sampali. Ketegangan ini tidak hanya mempengaruhi hubungan antarwarga, tetapi juga memunculkan gerakan perlawanan yang mencerminkan resistensi terhadap dominasi kekuatan eksternal yang merongrong hak-hak dasar mereka. Secara keseluruhan, pengambilalihan lahan, ketidakadilan kompensasi, kerusakan lingkungan, dan ancaman terhadap budaya lokal adalah indikator-indikator kunci yang memicu konflik dan mempengaruhi masyarakat Sampali dalam menghadapi ekspansi Citraland Megapolitan (Murdianto, 2021).

Dampak yang Diterima Masyarakat Sampali terhadap Pembangunan Citraland

Pembangunan Citraland di Desa Sampali telah membawa dampak signifikan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat lokal. Secara sosial, warga menghadapi penggusuran dan relokasi, yang memutuskan hubungan mereka dengan tanah leluhur dan merusak jaringan sosial yang telah terbentuk lama. Perbedaan pendapat mengenai proyek ini juga memicu ketegangan dan konflik internal dalam komunitas, sementara perubahan demografis akibat masuknya penduduk baru mengancam keberlanjutan budaya dan nilai-nilai lokal (Sabri et al., 2020).

Secara ekonomi, banyak warga kehilangan mata pencaharian karena lahan pertanian mereka diambil alih untuk pembangunan. Meskipun ada peluang kerja baru, sebagian besar warga tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengisi posisi tersebut, sehingga manfaat ekonomi dari pembangunan ini tidak merata. Peningkatan harga tanah dan properti juga menyebabkan kenaikan biaya hidup, yang semakin menekan ekonomi masyarakat yang sudah rentan. Dampak lingkungan dari pembangunan Citraland juga tidak bisa diabaikan. Penggundulan lahan menyebabkan erosi tanah dan degradasi kualitas tanah, sementara aktivitas konstruksi mencemari air dan udara, meningkatkan risiko penyakit bagi warga. Hilangnya habitat alami mengancam keanekaragaman hayati daerah tersebut, mengurangi flora dan fauna lokal yang penting bagi keseimbangan ekosistem (Aryan Firdaus, 2023).

Kesehatan masyarakat juga terpengaruh, dengan peningkatan stres dan masalah kesehatan mental akibat ketidakpastian dan tekanan ekonomi. Polusi lingkungan memperburuk kondisi kesehatan fisik, menambah beban penyakit yang harus ditanggung warga (Batlajery et al., 2018). Budaya lokal juga terancam, dengan situs-situs budaya yang berpotensi hilang dan praktik-praktik budaya yang terancam punah akibat pengaruh luar. Identitas budaya masyarakat mulai tergerus, mengancam warisan yang telah ada selama bertahun-tahun. Politik lokal ikut terguncang dengan berkurangnya partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan. Perubahan kontrol atas lahan dan sumber daya lokal memperlemah posisi masyarakat dalam negosiasi, menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan pengembang (Utomo, 2020).

Untuk mengatasi dampak ini, perlu ada kebijakan yang adil dan inklusif. Kompensasi yang memadai harus diberikan kepada warga yang terdampak, sementara partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan harus ditingkatkan. Program pelatihan dan pendidikan perlu disediakan untuk membantu warga beradaptasi dengan peluang ekonomi baru, dan kebijakan perlindungan lingkungan harus diterapkan secara ketat untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem lokal. Inisiatif ekonomi lokal yang berkelanjutan juga harus dipromosikan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan memahami dan mengatasi berbagai dampak ini, diharapkan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan dapat dicapai bagi masyarakat Sampali, memastikan bahwa pembangunan Citraland membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat (Anshari et al., 2024).

Upaya Masyarakat Sampali Menghadapi Konflik Citraland

Menyadari posisinya yang lemah, karena tidak adanya persatuan yang dapat menjadi kekuatan dan daya tekan, warga yang menolak pembangunan Citraland kemudian bergerak membangun kekuatan dan solidaritas untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Masyarakat mulai menggali kesadarannya dan mempelajari hak-haknya sebagai warga negara (Bilaldzy & Ariani, 2022). Untuk mewadahi dan melegitimasi perjuangan mereka kemudian membentuk organisasi yang diberi nama Kerukunan Warga Masyarakat Lemah (KWML). Secara internal kegiatan mereka berupa peningkatan kapasitas intelektual mereka, antara lain keterampilan menganalisis konflik struktural dan mengidentifikasi akar masalah yang menyebabkan warga tidak berdaya dalam metode riset aksi (R. Rahman, 2017).

Hasil analisis memetakan sikap para aktor yang berseberangan dengan warga. Sedikitnya ada beberapa pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Citraland dan terlibat dekat dengan pengambilan keputusan. Mereka terdiri dari pihak swasta atau investor, BUMN (PTPN II), aparat keamanan, pemerintah daerah, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). Upaya perlawanan sudah dilakukan dengan aksi demonstrasi, audiensi, mediasi dan delegasi tidak ada hasil yang memuaskan bagi masyarakat desa. Aksi dilakukan karena masyarakat yang hidup puluhan tahun di Sampali, terancam digusur oleh PT NDP yang merupakan anak perusahaan PTPN II untuk pembangunan proyek perumahan mewah Citraland Deli Megapolitan. Dengan penggusuran terancam dan di terror kepada warga masyarakat Dusun I sampai dengan Dusun 24 Desa Sampali adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Tualeka, 2017).

Menurut warga, perjuangan mereka dalam perjuangan agrarian, dengan tuntunan relokasi desa, sebagai desa pengganti, lengkap dengan tempat tinggal dan lahan garapan 2.000 meter persegi untuk setiap keluarga. Untuk mencapai tuntunan ini warga tidak memilih jalur hukum melalui upaya litigasi. Dalam memori mereka, telah banyak kegagalan kelompok-kelompok masyarakat lain dalam memanfaatkan jalur hukum ketika menghadapi konflik agrarian di Indonesia (Syafi'i, 2016). Bagi mereka pengadilan selama ini selalu berpihak pada pihak yang kuat terutama pemilik modal.

Sampai saat ini, perjuangan warga belum mencapai titik kemenangan seperti yang diinginkan. Pada saat penggusuran dan pengrusakan rumah atau lahan warga hanya sebagian kecil mendapat ganti rugi tanah dengan perluasan minimal untuk mendirikan tempat tinggal baru. Namun demikian, statusnya tidak jelas. Ganti rugi seperti ini tidak mengurangi kerentanan warga dalam konteks yang semakin terjepit. Saat ini warga mulai berhimpun kembali untuk perjuangan lanjutan demi kejelasan status ganti rugi ini. Satu hal penting dapat dipelajari dari kasus bahwasannya yang berkuasa adalah pemilik modal atau kaum borjuis (Nuraeni et al., 2021).

Masyarakat Sampali menghadapi konflik dengan pembangunan Citraland melalui berbagai upaya yang terorganisir dan strategis. Mereka membentuk kelompok advokasi dan meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak mereka melalui pendidikan dan seminar. Melalui dialog dan negosiasi dengan pengembang serta kerjasama dengan pemerintah daerah, mereka berusaha menyampaikan kekhawatiran dan mencari solusi yang adil. Kampanye media dan publikasi penelitian digunakan untuk meningkatkan kesadaran publik dan dukungan luas. Dalam ranah hukum, masyarakat mempertimbangkan gugatan hukum dan konsultasi dengan pengacara berpengalaman. Selain itu, mereka mempromosikan alternatif ekonomi lokal dan mengadakan pelatihan keterampilan untuk memitigasi dampak ekonomi (Kamim et al., 2018). Aliansi dengan LSM dan jaringan komunitas lain memperkuat advokasi mereka. Penggunaan teknologi dan pengumpulan data lingkungan membantu mendokumentasikan dampak pembangunan, memperkuat posisi mereka dalam negosiasi. Melalui

pendekatan ini, masyarakat Sampali berupaya melindungi hak-hak mereka dan mencapai solusi yang berkelanjutan dan adil dalam menghadapi pembangunan Citraland (Nugroho, 2018).

Dalam menghadapi konflik yang timbul dari ekspansi Citraland Megapolitan, masyarakat Desa Sampali mengadopsi berbagai strategi perlawanan yang mencerminkan resistensi marginal. Salah satu upaya utama adalah mengorganisir diri melalui kelompok-kelompok komunitas untuk memperkuat solidaritas dan menyusun rencana aksi bersama. Mereka menggelar protes dan demonstrasi untuk menarik perhatian publik dan media, berharap dapat menekan pemerintah dan pihak pengembang agar menghentikan atau mengubah rencana pembangunan yang merugikan. Masyarakat juga menggunakan jalur hukum dengan mengajukan gugatan terhadap pengembang, menuntut keadilan atas pengambilalihan lahan dan pelanggaran hak-hak mereka. Upaya advokasi ini sering kali didukung oleh organisasi non-pemerintah (LSM) yang menyediakan bantuan hukum dan dukungan logistic (L. A. Rahman & Husein, 2023).

Selain itu, masyarakat Sampali mengadopsi strategi non-kooperatif seperti menolak penjualan tanah dan tetap menjalankan aktivitas sehari-hari di lahan yang diklaim oleh Citraland. Mereka juga mengadakan musyawarah desa untuk menyusun resolusi yang menegaskan hak atas tanah dan sumber daya alam mereka, serta membangun aliansi dengan desa-desa tetangga yang menghadapi ancaman serupa. Pendidikan dan penyadaran masyarakat juga menjadi fokus utama, di mana warga desa diberikan informasi mengenai hak-hak mereka dan pentingnya mempertahankan identitas budaya dan kearifan lokal (Ibrahim et al., 2022).

Kampanye media sosial dan petisi online digunakan untuk mendapatkan dukungan luas dari masyarakat luar desa dan memperkuat posisi tawar mereka. Upaya lain termasuk mengundang jurnalis dan peneliti untuk mendokumentasikan perjuangan mereka, dengan harapan bahwa publikasi luas dapat menambah tekanan terhadap pengembang dan pemerintah. Dalam beberapa kasus, masyarakat juga terlibat dalam dialog langsung dengan pihak pengembang untuk mencari solusi yang lebih adil, meskipun sering kali dialog ini berakhir buntu (Dharmawan, 2006). Melalui berbagai bentuk perlawanan ini, masyarakat Sampali berusaha mempertahankan kedaulatan atas tanah mereka, melindungi lingkungan, dan menjaga keberlanjutan budaya serta sosial mereka. Resistensi marginal yang mereka tunjukkan adalah cerminan dari kekuatan dan ketahanan komunitas dalam menghadapi dominasi eksternal yang mengancam keberadaan mereka.

Ekspansi Citraland Megapolitan terhadap Konflik di Desa Sampali

Ekspansi Citraland Megapolitan di Desa Sampali telah memicu konflik yang signifikan antara pengembang properti besar dan warga lokal yang terdampak. Proyek pembangunan perumahan mewah ini membutuhkan pengambilalihan lahan yang luas, yang sering kali dilakukan tanpa persetujuan penuh atau pemahaman mendalam dari penduduk desa. Banyak warga merasa bahwa kompensasi yang ditawarkan tidak sebanding dengan nilai tanah mereka dan tidak cukup untuk menggantikan kehilangan yang mereka alami, baik dari segi finansial maupun emosional. Selain masalah kompensasi, ada juga kekhawatiran mendalam tentang dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek besar ini, termasuk degradasi ekosistem lokal dan kerusakan lahan pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian banyak penduduk (Fahrimal & Safpuriyadi, 2018). Lebih jauh lagi, perubahan struktur sosial-ekonomi desa akibat masuknya perumahan mewah bisa menyebabkan meningkatnya harga tanah dan biaya hidup, yang mengancam keberlanjutan komunitas lokal. Konflik ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi dalam proses urbanisasi dan ekspansi perkotaan di daerah pedesaan, di mana kepentingan ekonomi dan pembangunan sering kali berbenturan dengan hak-hak serta kesejahteraan masyarakat setempat (Rachman, 2013). Warga desa yang merasa terpinggirkan dan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan merasa perlu untuk memperjuangkan hak mereka, seringkali melalui aksi protes dan jalur hukum, untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan kebutuhan mereka dipertimbangkan dalam setiap tahap pengembangan proyek ini (Zunariyah, 2012).

Citraland Megapolitan di Desa Sampali telah menjadi akar konflik yang kompleks dan mendalam, melibatkan berbagai lapisan sosial, ekonomi, dan budaya. Proses pengambilalihan lahan yang dilakukan oleh Citraland sering kali berjalan tanpa transparansi dan melibatkan intimidasi serta manipulasi, di mana tanah milik warga desa yang telah mereka huni dan kelola selama beberapa generasi diambil alih untuk proyek pembangunan perumahan mewah dan fasilitas komersial. Banyak warga yang merasa dipaksa melepaskan tanah mereka dengan kompensasi yang tidak memadai, atau bahkan tanpa kompensasi sama sekali, menimbulkan ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan yang

mendalam. Kehilangan lahan ini tidak hanya menghapus sumber mata pencaharian utama yang bergantung pada pertanian dan kegiatan ekonomi lokal lainnya, tetapi juga memutus hubungan emosional dan historis masyarakat dengan tanah mereka (Zakie, 2017).

Dampak lingkungan dari pembangunan masif ini juga sangat meresahkan, dengan hilangnya area hijau, polusi, dan perubahan signifikan dalam ekosistem lokal yang mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat (Herlina & Supriyatin, 2021). Air sungai yang tercemar, kualitas udara yang menurun, dan kebisingan yang meningkat telah memperburuk kondisi hidup warga. Selain itu, tekanan untuk beradaptasi dengan gaya hidup perkotaan yang dibawa oleh proyek ini mengancam kelestarian budaya dan tradisi lokal, memicu ketegangan antarwarga dan generasi (Masyarakat et al., 2015).

Pemerintah lokal dan pihak pengembang sering kali dianggap abai terhadap keluhan dan aspirasi masyarakat, memperburuk rasa ketidakadilan. Dialog yang diadakan sering kali berakhir tanpa hasil konkret, meninggalkan masyarakat dalam keadaan frustrasi dan tidak berdaya. Sebagai respons, warga Sampali telah mengorganisir berbagai bentuk perlawanan, mulai dari aksi protes hingga advokasi hukum, meskipun menghadapi banyak tantangan dan tekanan. Ekspansi Citraland Megapolitan, dengan segala implikasinya, telah memicu konflik yang berakar dalam di Desa Sampali, mengubah tatanan kehidupan, dan menantang kemampuan masyarakat untuk mempertahankan identitas, kemandirian, dan keberlanjutan mereka di tengah arus kapitalisme dan urbanisasi yang agresif (R. Rahman, 2017).

SIMPULAN

"Resistensi Marginal: Perlawanan Masyarakat Desa Sampali Terhadap Ekspansi Citraland Megapolitan" mengulas tentang dinamika konflik antara warga lokal dan pengembang properti dalam konteks urbanisasi dan modernisasi. Desa Sampali, yang terletak di kawasan pinggir kota, menghadapi ancaman eksistensi akibat ekspansi megapolitan oleh Citraland. Penduduk setempat, yang mayoritas adalah petani dan buruh, merasa terusir dari tanah leluhur mereka yang telah diwariskan turun-temurun. Ekspansi ini memicu reaksi keras dari masyarakat yang merasa hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam diabaikan. Mereka meluncurkan berbagai bentuk perlawanan, mulai dari aksi protes, pengajuan petisi, hingga jalur hukum untuk mempertahankan hak mereka. Dalam proses ini, masyarakat desa menunjukkan solidaritas dan keberanian dalam melawan kekuatan besar yang mencoba merampas tanah mereka. Penelitian ini juga menyoroti ketidakadilan yang sering terjadi dalam proses pembangunan, di mana kepentingan ekonomi lebih diutamakan daripada kesejahteraan masyarakat lokal. Di samping itu, resistensi yang ditunjukkan oleh masyarakat Desa Sampali menjadi simbol perlawanan marginal yang sering kali tidak terdengar suaranya dalam arus utama pembangunan. Akhirnya, kasus ini mencerminkan pentingnya inklusivitas dan keadilan sosial dalam setiap rencana pembangunan untuk menghindari konflik berkepanjangan dan kerugian sosial yang lebih besar.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sengketa tanah dapat terjadi akibat adanya keinginan untuk menguasai sumber daya tanah. Selain itu ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan tanah untuk kepentingan tertentu sehingga terjadinya konflik agrarian dan perebutan lahan. Bahkan dengan adanya perebutan lahan masyarakat kecil bakal tertindas oleh pemilik modal atau kaum borjuis. Adapun bentuk perlawanan masyarakat yaitu dengan melakukan aksi-aksi yang bertahap untuk memperjuangkan haknya mereka. Ada beberapa cara yang dilakukan masyarakat untuk memberikan mereka lahan untuk tinggal atau solusi dengan cara melobi perusahaan, menemui pemerintah daerah, tetapi tidak ada hasil sama sekali.

Konflik antara masyarakat Sampali dan pembangunan Citraland di Desa Sampali mencerminkan kompleksitas dan tantangan yang sering kali menyertai proyek-proyek pembangunan besar. Pengusuran dan relokasi yang diakibatkan oleh pembangunan ini telah memicu berbagai dampak sosial, ekonomi, lingkungan, kesehatan, budaya, dan politik yang signifikan bagi masyarakat lokal. Secara sosial, pengusuran mengakibatkan disintegrasi komunitas yang erat dan menimbulkan ketegangan internal. Secara ekonomi, warga menghadapi kehilangan mata pencaharian dan peningkatan biaya hidup, sementara manfaat ekonomi dari proyek ini tidak merata. Lingkungan juga terancam dengan degradasi lahan, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati, yang semuanya berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Selain itu, budaya lokal terancam erosi akibat hilangnya situs budaya dan pengaruh luar yang masuk bersama pembangunan.

Untuk mengatasi dampak-dampak ini dan mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup kompensasi yang memadai, peningkatan partisipasi masyarakat, penyediaan pelatihan dan pendidikan, penerapan kebijakan perlindungan lingkungan yang ketat, dan promosi inisiatif ekonomi lokal yang berkelanjutan. Kesimpulannya, konflik ini menyoroti

pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan hak-hak serta kesejahteraan masyarakat lokal. Melalui kerjasama yang inklusif dan pendekatan kebijakan yang berkeadilan, diharapkan bahwa pembangunan Citraland dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat Sampali.

REFERENSI

- Abrizal. (2008). *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Laboraturium Sosiologi FISIP UNAND.
- Aminah, S. (2016). Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 20(1). <https://doi.org/10.7454/mjs.v20i1.4751>
- Anshari, A., Amin, M., Situmorang, T. P., Politik, M. I., Ilmu, F., & Politik, I. (2024). *Dampak Konflik Agraria Terhadap Kepercayaan Politik The Impact of Agrarian Conflict on the Political Trust of Peasants in North Sumatra*. 13(2), 426–435. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i2.11088>
- Aryan Firdaus, M. (2023). Dampak Sosial Konflik Agraria. *Osf.Io*.
- Astarika, R. (2016). Konflik agraria Suku Anak Dalam Jambi dalam tinjauan sosiologi. *Indonesia yang Berkeadilan Sosial tanpa Diskriminasi*, 109–124.
- Astuti, P. (2011). Kekerasan Dalam Konflik Agraria: Kegagalan Negara Dalam Menciptakan Keadilan Di Bidang Pertanahan. *Forum*, 39(2), 52–60.
- Batlajery, A., Pattiselanno, A. E., & Kakisina, L. O. (2018). Konflik Agraria Di Desa Watmuri Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Agrilan : Jurnal Agribisnis Kepulauan*, 5(2), 88. <https://doi.org/10.30598/agrilan.v5i2.157>
- Bilaldzy, A., & Ariani, R. S. (2022). Tinjauan Kritis Urgensi Pembentukan Pengadilan Agraria : Upaya Menangani Inefektivitas Penyelesaian Konflik Agraria pada Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(9), 688–711. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i9.311>
- Dahlan, N. A. (2020). Sejarah Desa Diwek Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. *Jurnal Politik Muda*, 3(2), 1–9.
- Dharmawan, A. H. (2006). Konflik-Sosial dan Resolusi Konflik : Analisis Sosio-Budaya (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat). *Seminar PERAGI Pontianak*, 10(11), 1–14. <https://www.academia.edu/download/31194465/Konflik-Sosial-dan-Resolusi-Konflik-Analisis-Sosio-Budaya-Dengan-Fokus-Perhatian-Kalimantan-Barat.pdf>
- Fahrimal, Y., & Safpuriyadi, S. (2018). Komunikasi Strategik Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Indonesia. *Jurnal Riset Komunikasi*, 1(1), 109–127. <https://doi.org/10.24329/jurkom.v1i1.18>
- Healey, P. (1999). Institutional Analysis, Communicative Planning, and Shaping Places. *Journal of Planning Education and Research*, 19(2), 111–121.
- Heijden, J. Van Der. (2011). Institutional Layering: a Review of the Use of the Concept. *Politics*, 31(1), 9–18.
- Herlina, N., & Supriyatin, U. (2021). Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(2), 204. <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5610>
- Hodgson, G. (2004). *The Evolution of Institutional Economics. Agency, Structure, and Darwinism in American Institutionalism*. Routledge.
- Huda, M. N., Duwila, M., & Rohmadi, R. (2023). Menantang Disintegrasi Moral di Era Revolusi Industri 4.0 : Peran Revolusioner Pondok Pesantren. *Journal of Islamic Education*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.18860/jie.v9i1.22805>
- Ibrahim, M. A., Hidayat, E., & Alexandra, H. (2022). Resolusi Konflik Agraria Dalam Pembangunan Bandar Udaratoraja Di Kabupaten Tanatoraja. *Jurnal Education and ...*, 10(2), 186–191. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3649>
- Jessop, B. (2001). *Institutional returns and the strategic-relational approach environment and planning*.
- Kamim, A. B. M., Amal, I., & Khandiq, M. R. (2018). Dilema Pemetaan Partisipatif Wilayah Masyarakat Adat di Indonesia : Upaya Resolusi Konflik Agraria dan Kritiknya. *Prosiding Senas POLHI ke-1*, 107–120.
- Maiwan, M. (2015). Teori-Teori Ekonomi Politik Internasional Dalam Perbincangan: Aliran Dan Pandangan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15(1), 109–125. <https://doi.org/10.21009/jimd.v15i1.9114>

- Marzali, A. (1997). *Amri Marzali (Universitas Indonesia) Abstract Sejarah Pendekatan Fungsional Teori Radcliffe-Brown*. XXI(52), 127–137.
- Masyarakat, E., Di, S., Sambiroto, K., Tembalang, K., Rahayu, K. D. I. S., Top, H., I, P. C., Intan, P., & Salah, S. (2015).
- Moleong, L. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mourlaert, F., Jessop, B., & Mehmood, A. (2016). Agency, structure, institutions, discourse (ASID) in urban and regional development. *International Journal of Urban Sciences*, 20(2), 167–187.
- Mulyani, L. (2018). Review Buku “ KOLONIALISME DAN KAPITALISME : FENOMENA GLOBAL YANG TERUS BERULANG DALAM PROSES PERUBAHAN AGRARIA .” *BHUMI : Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(2), 266–277.
- Murdianto, R. F. S. dan. (2021). HUBUNGAN TINGKAT KONFLIK AGRARIA DENGAN TINGKAT EFEKTIVITAS PROGRAM MODEL KAMPUNG KONSERVASI (Desa Cipeuteuy , Kecamatan Kalandungan , Kabupaten Sukabumi , Provinsi Jawa Barat) The Relation Between Agrarian Conflict Level with Effectiveness Of Kampung C. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, 05(02), 345–359.
- Natsir, M., & Ridha, M. (2018). Melepaskan Penguasaan Rakyat Atas Tanah: Introgasi Kritis Atas Kondisi Agraria Indonesia Kontemporer. *Sosioireligius: Jurnal Sosiologi Agama*, 3(1), 53–66.
- Nendissa, J. E. (2022). IDENTITAS MANUSIA Julio Eleazer Nendissa e-Journal Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 4, 69–76.
- Nugroho, O. C. (2018). Konflik Agraria di Maluku Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 9(1), 87. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.87-101>
- Nuraeni, P., Saprudin, S., & Susilawati, L. (2021). Distingsi Kaum Borjuis Dengan Kaum Proletar Dalam Novel “Wuthering Heights” Karya Emily Bronte. *KREDO : Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, 5(1), 19–34. <https://doi.org/10.24176/kredo.v5i1.6268>
- Ostrom, E. (2005). *Understanding Institutional Diversity*. Princeton University Press.
- Prasetyo, P. E. (2025). *Standarisasi Dan Komersialisasi Produk Industri Kreatif Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. 657–662.
- Rachman, N. F. (2013). Rantai Penjelaras Konflik-konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas di Indonesia. *Bhumi*, 12(37), 1–14.
- Rahman, L. A., & Husein, A. R. (2023). Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Sengketa Agraria. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(05), 47–58.
- Rahman, R. (2017). Konflik Masyarakat Dengan Pemerintah (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat). *Sosioireligius*, 2(1), 41–48.
- Ridha, M. (2014). Mamminasata Dan Dampaknya Di Pedesaan. *Bhumi : Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, No.40 Tahun 13, Oktober 2014, 504–521.
- Ridwanto, T. A. (2014). Teori Konflik Dalam Perspektif Politik Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 5(Desember), 207–218. www.jchunmer.wordpress.com
- Rofiah, K. (2017). Dinamika Relasi Muhammadiyah dan NU Dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser. *Kalam*, 10(2), 469. <https://doi.org/10.24042/klm.v10i2.10>
- Sabri, Nasution, F. A., & Arif, M. S. (2020). Implementasi Corporate Social Responsibility Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. In *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* (Vol. 12, Nomor 2). <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955>
- Saputro, E. (2019). Peran Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Dalam Gerakan Penolakan Penggusuran Waduk Sepat di Kelurahan Lidah Kulon Surabaya. *Unair*, 1–13. https://repository.unair.ac.id/91811/4/FIS_P_77_19_Sap_p_JURNAL_SKRIPSI_ENDY_SAPUTRO.pdf
- Sholahudin, U. (2017). Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria. *Dimensi*, 10(2), 49–59.
- Sumartono. (2019). Dinamika Perubahan Sosial dalam Teori Konflik. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis*, 5(1), 1–17.
- Syafi'i, I. (2016). Konflik Agraria di Indonesia: Catatan Reflektif Konflik Perkebunan Kelapa Sawit di Kotawaringin Timur. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 18(3), 415–432.
- Tualeka, M. W. N. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern. *Al-Hikmah*, 3(1), 32–48. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/409>

- Utomo, S. (2020). Penerapan Hukum Progresif dalam Penyelesaian Konflik Agraria. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3(2), 33–43. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.3998>
- Windasari, I. P., Surendro, K., & Digital, A. K. (2011). Pengukuran Kesenjangan Digital di Institusi Pemerintah Daerah (Studi Kasus : Pemerintah Kota Semarang). *Jurnal Sistem Komputer*, 1(2), 71–76.
- Zakie, M. (2017). Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 24(1), 40. <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i1.4256>
- Zunariyah, S. (2012). Dilema Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sosiologi Kritis. *Eprints.Uns.Ac.Id*, 20, 1–12.